

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Sumadi . *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan Dan Perbandingan Dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- _____. *Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Astawa, I Gede Pantja. *Problematisa Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*. Edited by Alumni. Bandung, 2008.
- Bahir Mukhammad. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Buana, Mirza Satria. *Menimbang Lembaga Peradilan Khusus Pemilu: Studi Perbandingan Hukum Tata Negara*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2018.
- Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Edited by Endang Wahyudin. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Fatmawati. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Gaffar, Jenedri M. *Kedudukan, Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Hantoro, B. F. *Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada*. Yogyakarta: Media Iuris, 2024.
- Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional, Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Huda, Ni' Matul . *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Jurdi, Fajlurrahman . *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edited by Muhammad Fauzan Zarkasi. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2016.

- Mahmodin, Mahmud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Nugroho, I. B. *Politik Hukum Pengesahan Undang-Undang Sistem Pemilihan Umum Nasional: Studi Teoritis Unifikasi Rezim Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Penerbit Puskapsi, 2024.
- Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Edisi 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suharizal. *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sutoyo. *Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Universitas Pancasila, 2019.
- S. Lev, Daniel . *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siboy, Ahmad . *Pengantar Hukum Pilkada*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2010.
- Widodo, Heru. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wiranggani, Panjalu. *Demokrasi*. Edited by abd Kholiq. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid 1. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Jurnal

- Bantu, Y. A., Rahim, E. I., & Tome, A. H. (2024). "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XX/2022 tentang pembentukan badan peradilan khusus pemilu ditinjau dari teori kedaulatan hukum." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(1), 5.
- Fauzi, W. M., Muslim, I., & Alhadi, M. N. (2025). "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 tentang Badan Peradilan Khusus sebagai Landmark Decisions." *Bacarita Law Journal*, 5(2), 2.

Hantoro, B. F. (2024). "Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada." *Media Iuris*, 7(1), 62.

Hermanto, B., & Aryani, N. M. (2023). "Quo Vadis Pengadilan Khusus di Indonesia dalam Batasan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4), 418.

Kosariza, K., & Prasna, A. D. (2024). "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 atas perkara mengenai badan peradilan khusus." *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 4(1), 7.

Latifah Astri, Adibah Oktavia Isti, & Esfandiari, Fitria. (2019). "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 27–48.

Nasrullah, & Lailam, Tanto. (2017). "Dinamika dan Problematika Politik Hukum Lembaga Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Media Hukum*, 24(1).

Riqiey, B. (2023). "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *JAPHTN-HAN*, 2(1), 124.

Subiyanto, Achmad Edi. (2011). "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi*, 8(5), 707-732.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-XX/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

WEBSITE

Ambaranie, Nadia Kemala Movanita. "Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita." *Kompas.com*. Diakses pada 27 Desember 2014. <https://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/15533261/Kasus.Suap.Penanganan.Sengketa.Pilkada.Akil.Mochtar.yang.Menggurita>

"Posisi Dilematis MA Dalam Sengketa Pilkada Depok." Accessed November 14, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-dilematis-ma-dalam-sengketa-pilkada-depok-ho113610/?page=2>.